

**ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PARTISIPATIF GUNA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(STUDI KASUS KECAMATAN DOLOKSANGGUL)**

**¹ENRICO PARSAORAN LUMBAN TOBING, ²JHONSON PASARIBU, ³PANTAS H. SILABAN
^{1,2,3}MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
EMAIL : *enrico_tobing@yahoo.com*¹, *jhonson.pasaribu@uhn.ac.id*², *pantas.silaban@uhn.ac.id*³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Merancang model perencanaan partisipatif di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan belum dilaksanakan secara optimal dan hasil usulan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Doloksanggul belum seluruhnya dapat ditangani menjadi program/kegiatan prioritas yang ditampung dalam APBD. Untuk itu perlu peningkatan pemahaman tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif serta pengusulan kegiatan prioritas dapat mempertimbangkan ketersediaan sumber daya baik anggaran maupun SDM.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to Describe the participatory planning process in Doloksanggul District, Humbang Hasundutan Regency Analyze the factors that influence the participatory planning process in Doloksanggul District, Humbang Hasundutan Regency Design a participatory planning model in Doloksanggul District, Humbang Hasundutan Regency. The method used in this research is a descriptive research method, so that in this research there are no known samples, but informants. From the research results, it was found that the Development Planning Process in Doloksanggul District, Humbang Hasundutan Regency has not been implemented optimally and the results of community proposals which are development priorities in Doloksanggul District have not yet been fully handled into priority programs/activities accommodated in the APBD. For this reason, it is necessary to increase understanding of the stages of implementing participatory planning and the proposal of priority activities can take into account the availability of resources, both budget and human resources.

Keywords: Participatory Planning, Community Participation

PENDAHULUAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ada dua pendekatan top down dan bottom up tujuannya untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun pada kenyataannya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar pengusulan kegiatan yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perspektif dan partisipatif. Pendekatan perspektif

dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top Down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi konflik atas berbagai kepentingan Pemerintah Daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Musrenbang dilaksanakan baik pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Walaupun selama ini hasil dari forum tersebut di beberapa daerah tidak bisa diimplementasikan dan formalitas saja. Begitu juga di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2023 data usulan kegiatan yang menjadi prioritas melalui musrenbang Desa sesuai informasi yang didapatkan bahwa di Kecamatan Doloksanggul pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa ada 234 jumlah usulan kegiatan dari 27 Desa dan 1 Kelurahan yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di Desa masing-masing. Namun kenyataan kegiatan yang diusulkan tersebut hanya beberapa yang ditindaklanjuti menjadi kegiatan. Sesuai informasi yang didapatkan dari 234 usulan kegiatan yang diusulkan, dapat ditindaklanjuti menjadi kegiatan hanya 27 usulan. Dari pendapat tersebut jelas bahwa pendekatan partisipatif melalui musrenbang hanya retorika saja Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan Kepala Daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat Desa dan Kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim dengan realisasi yang minim. Hasil musrenbang dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (RKPD) apabila ada kesamaan dengan program yang dimiliki pemerintah daerah. Dari pengamatan penulis yang mengikuti Proses Musrenbang di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan hanya berisi kegiatan berupa paparan dari (OPD) Organisasi Perangkat Daerah seperti Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan mengenai kegiatan yang dilaksanakan tahun yang akan datang. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai seputar kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada diskusi dan negosiasi antara pemerintah daerah dengan Peserta tentang isu-isu atau permasalahan serta pemecahan masalah. Peserta tidak memiliki data yang lengkap dalam rangka persiapan pelaksanaan Musrenbang yang idealnya harus dimiliki seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan, Data hanya di miliki OPD yang bersangkutan sehingga jelas bahwa sebenarnya forum musrenbang merupakan forum yang seakan-akan partisipatif di karenakan aktor yang penting dan dominan dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah eksekutif atau pemerintah daerah bukan masyarakat Humbang Hasundutan. Dari penjelasan tersebut bahwa sebuah perencanaan mempunyai komponen penting yaitu tujuan, kegiatan dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan- tindakan masa. Dari Pengamatan penulis hasil/keluaran Musrenbang sebagai dokumen perencanaan sangat tidak sistematis hanya berisi rekapitulasi dari hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang berisi kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Desa/Kelurahan membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui semakin banyak, kemudian dari segi tujuan, cara untuk merealisasi kegiatan-kegiatan dan waktu secara rinci tidak dicantumkan. Kemudian menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050- 187/KEP/Bangda/2007 Musrenbang sebagai bagian penting dari perencanaan partisipatif, memiliki karakter sebagai berikut :Merupakan ‘demand driven process’ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholder untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangan, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD). Bersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk

menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan consensus Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (mutually acceptable solutions) Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Keterlibatan stakeholders dalam memberikan aspirasi dan kebutuhan merupakan faktor sangat menentukan dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. Berdasarkan Pengamatan penulis dan melihat daftar hadir musrenbang, kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPRD Dapil 1 Humbang Hasundutan, Muspika Doloksanggul, Kepala OPD, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan dari organisasi kepentingan seperti LSM atau organisasi privat tidak masuk dalam peserta Musrenbang. Jadi jelas dengan tidak semua keterwakilan stakeholders dan rendahnya kontribusi peserta baik dalam memberikan aspirasi, serta tidak adanya diskusi atau negosiasi antar stakeholders sangat berpengaruh dalam menentukan hasil atau keluaran Musrenbang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan-kegiatan beberapa orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang telah diberikan oleh Siagian yang dikutip oleh Pasolong (2007: 3) mengatakan: "Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur manusia baik dua atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Menurut Max Webber dalam Kumorotomo (2005:82) administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara Siagian (2001:4) menguraikan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Syafie (2006:24) administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

METODE PENELITIAN

Staruss dan Corbin (1997) menyatakan bahwa minimal ada 2 alasan perlunya melakukan pemilihan penelitian kualitatif yaitu pertama, karena sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif dan yang kedua untuk mengungkap dan memahami suatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menenukan sifat atau pengalaman seseorang dengan suatu fenomena yaitu perencanaan Partisipatif di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif di maksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi fenomena atau kenyataan sosial (faisal,1999,20). Sedangkan pendekatannya dengan studi kasus. Studi kasus merupakan tipe dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan dengan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komperhensif (Faizal,1999:20

HASIL PENELITIAN

Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diuraikan sebagai kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan masing-masing tahapan proses perencanaan dari bawah. Pelaksanaan mekanisme

perencanaan dari bawah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan berikut ini: Tahapan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah; penyiapan rancangan rencana pembangunan daerah; musyawarah perencanaan pembangunan daerah; penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah; penyusunan dan Penetapan Kebijakan Umum APBD; penyusunan dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; penyusunan dan Penetapan RKA OPD; penyusunan dan Penetapan Rancangan APBD penetapan APBD. Dalam hal pelaksanaan musrenbang Kecamatan Doloksanggul, masyarakat mengharapkan usulan prioritas yang diusulkan dapat menjadi kegiatan yang akan ditampung oleh OPD pada tahun 2024. Menurut informan yang menjadi peserta musrenbang di Kecamatan Doloksanggul, yaitu Kepala Desa, Lurah, LSM dan Tokoh Masyarakat mengemukakan bahwa usulan prioritas yang diusulkan masing-masing desa/kelurahan sebaiknya menjadi program/kegiatan oleh OPD sehingga musrenbang yang dilaksanakan lebih bermakna dan bukan hanya menjadi seremonial yang dilaksanakan setiap tahunnya, seperti yang terjadi pada tahun 2023 sesuai hasil paparan OPD yang menjadi narasumber dari usulan pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2022 hanya sedikit yang menjadi program/kegiatan pada OPD bahkan ada beberapa desa yang tidak ditampung menjadi program/kegiatan pada tahun 2023 terhadap usulan yang diberikan pada tahun 2022 dan yang menjadi pertanyaan dari para informan ada program/kegiatan OPD pada tahun 2023 bukan berasal dari usulan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan informan, beberapa hal dapat dicatat antara lain sebagai berikut: Penjelasan informan, Fungsional Perencana Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan: SDM aparatur yang ditugaskan sebagai perencana perlu ditambah dan kualitasnya perlu ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan sebagai planner. Guna peningkatan kualitas aparatur baik yang ada di Kabupaten maupun yang ada di kecamatan secara bertahap diprogramkan pendidikan baik formal maupun non formal termasuk pelatihan-pelatihan, diklat, penjenjangan, penataran-penataran sesuai kemampuan dana yang ada. Pandangan lainnya tentang mekanisme perencanaan dari bawah disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa proses perencanaan yang dilaksanakan sekarang sudah sesuai dengan harapan, namun mekanismenya perlu disempurnakan: "Meningat ketersediaan dana pembangunan yang relatif terbatas dan kebutuhan pembiayaan usulan masyarakat yang jauh melebihi ketersediaan dana yang ada, maka sebaiknya ada kriteria yang jelas tentang skala prioritas pembangunan dan diinformasikan kepada masyarakat, untuk itu sebaiknya narasumber yang mewakili oleh OPD untuk lebih ditingkatkan pengetahuannya dalam penyampaian skala prioritas pembangunan yang ditargetkan masing-masing OPD-nya." Bila dilihat dari tahapan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan, diperoleh gambaran sebagai berikut: Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan BPD tanpa melibatkan masyarakat. Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Kecamatan Doloksanggul Seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa pembahasan penelitian akan merujuk pada pendapat Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi

masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi diantara stakeholders. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat local yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat dusun/lingkungan melalui mekanisme sebagai berikut: Kadus/Kepling dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Kadus/Kepling beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/ranking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut: gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat. Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak. Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya. Cakupan Biaya, yaitu efisiensi penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Untuk setiap nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat yang akan menerima manfaat akan mempunyai bobot yang tinggi. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan tersebut dilaksanakan di salah seorang rumah warga yang dapat menampung banyak jumlah peserta, yang dihadiri oleh Kadus/Kepling beserta aparatnya dan seluruh warga di lingkungan yang bersangkutan. Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada setiap umumnya rendah. Khususnya warga perempuan yang nggan keluar rumah. Penyebab dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga. Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh pemerintah, sehingga hasil kegiatan penyelidikan hanya merupakan daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan penyelidikan di tahun berikutnya. Padahal kegiatan penyelidikan tersebut sangat penting untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan seterusnya. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Kepala Desa, sebagai berikut: Agar pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat, diperlukan

informasi yang jelas tentang masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat yang dikemas dalam kegiatan penyelidikan, dan ini harus dilakukan mulai tingkatan yang paling rendah yaitu dusun/lingkungan, hasil dari kegiatan ini dijadikan usulan prioritas kegiatan dalam musrenbang. Apabila masyarakat belum mampu merumuskan sendiri masalah dan kebutuhannya, maka perangkat desa membantu merumuskan masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Dari pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan penyelidikan ini penting untuk dilaksanakan, namun berdasarkan pengakuan Tokoh Masyarakat bahwa Sebagian besar desa belum dapat melakukan pembinaan kepada warganya khususnya para Kadus/Kepling untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah perangkat desa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan di tingkat dusun/lingkungan. Sehingga informasi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan ke tingkat desa umumnya merupakan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pandangan para kadus/kepling. Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas menunjukkan bahwa masalah dan kebutuhan yang diusulkan di tingkat desa tidak seluruhnya berasal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan di tingkat dusun/lingkungan, bahkan untuk beberapa ide usulan yang dirumuskan digali oleh elit desa seperti kades dan perangkatnya. Berdasarkan uraian di atas, tidak semua dusun/lingkungan dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Bagi dusun/lingkungan yang tidak menyelenggarakan kegiatan penyelidikan mempunyai alasan tertentu, yakni sebelum masalah dan kebutuhan yang diusulkan tahun kemarin ditindaklanjuti maka pihak dusun/lingkungan tidak akan melakukan penggalian masalah dan kebutuhan di tahun berikutnya. Mengingat masalah dan kebutuhannya masih sama bila belum diupayakan pemecahannya. Penyebab lainnya adalah bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat tentang perencanaan partisipatif menghambat pelaksanaan penyelidikan juga menghambat perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi perencanaan partisipatif kepada warga. Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan informasi, pemahaman serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli untuk terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari perencanaan, penyusunan dan Legalitas Perencanaan Legalitas disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Doloksanggul sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 050/167/Bappelitbangda/II/2023 Tanggal: 02 Pebruari 2023 Hal: Pelaksanaan Musreimbang Kecamatan. Perencanaan pembangunan Kecamatan Doloksanggul menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya gejolak dari masyarakat atas perencanaan pembangunan yang diputuskan, karena masyarakat pun terlibat dalam proses tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut: "Semuanya berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang mengatur.....tentunya tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, walaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya" Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung etika dan nilai yang ada di masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian sudah dideskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan keluaran, maka pada analisis hasil penelitian ini akan berusaha

untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan. Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendapat Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2001:16) sebagai acuan analisis yang mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, analisis yang digunakan adalah: Pertama, Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi. Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah: Menentukan arah dan tujuan kegiatan perencanaan pembangunan oleh masyarakat. Teridentifikasi jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat. Teridentifikasi rencana program masyarakat dalam pembangunan. Pada pelaksanaannya di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa desa melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat Dusun sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian desa lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan mesrenbang desa, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat dusun yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Kedua, Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegoatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor: Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan. Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi. Terbatasnya jumlah aparat yang bertugas mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan. Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Doloksanggul. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik

meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat di Kecamatan Doloksanggul, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa/kelurahan, dan daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan. Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Doloksanggul umumnya. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Doloksanggul masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut: Beberapa tahapan proses perencanaan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa dan kelurahan penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat. Hasil usulan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Doloksanggul belum seluruhnya dapat ditangani menjadi program/kegiatan prioritas yang ditampung dalam APBD hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman unsur perencana dalam tahapan perencanaan serta anggaran yang masih terbatas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada yang menjadi usulan dari masyarakat Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik rekomendasi kebijakan sebagai berikut: Perlu peningkatan pemahaman tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa, kecamatan, masyarakat dan unsur perencana dari setiap OPD melalui pelaksanaan bimbingan/pelatihan atau pendampingan dalam pelaksanaan musrenbang desa. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat Dusun supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat yang paling prioritas sehingga dalam pelaksanaan pengusulan kegiatan prioritas dapat

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya baik anggaran maupun SDM-nya sendiri. Perlu diterbitkan kebijakan dalam penentuan sumber program/kegiatan OPD yang direncanakan setiap tahun anggaran seperti program/kegiatan OPD 40% harus bersumber dari usulan musrenbang dalam hal mengakomodir perencanaan melalui jalur bottom-up, 30% dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk mengakomodir perencanaan melalui jalur politis dan 30% bersumber dari usulan teknokrat serta hasil monitoring OPD untuk mengakomodir perencanaan top-down. Untuk menjawab besarnya usulan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya dengan keterbatasan anggaran, perlu mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan seperti kita ketahui bahwa sumber pendanaan bukan hanya dari APBD, sehingga perlu kerja keras Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber pendanaan lainnya seperti pengusulan program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN dan Dana CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, Perencanaan daerah partisipatif, pondok edukasi, Solo.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 1997. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Bahua, Mohammad Iqbal, 2018. "Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat". Gorontalo: Ideas Publishing
- Bintoro dan Mustopadidjaya, AR. 1988. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan penerapan. Cetakan ke tujuh belas. LP3ES. Jakarta.
- Bogdan, R. C., Biklen, S. K., 1992, Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn & Bacon. Dunn, Wiliam, N, 2000, Pengantar analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, cetakan ketiga, Gajah Mada University Press.
- Faisal, Sanafiah. (1999). Format-Format Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko, Tani, 2003, Manajemen, Edisi Keenam, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Harun, 2010, Jurnal Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Islam Bandung, Vol. 1.
- Kuncoro, Mudradjad, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga
- Madekhan, 2007, Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi. Yogyakarta Sumodinigrat,
- Gunawan, 2000, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Moleong, 2012, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Robinson, 2012, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Bumi Aksara. Todaro.
- Soetrisno, L. 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1996, Perencanaa Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta
- Usman, Husaini & Purnomo setiady Akbar, 1996, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.